



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 7674-7680

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

## Manajemen Konflik Dalam Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Kabupaten Bandung: Perspektif Administrasi Publik

Agnia Nurul Huda<sup>1</sup>, Indra Aditya Prayoga<sup>2</sup>, Dewi Untari<sup>3</sup>

<sup>1,3,2</sup> Universitas Mandiri, Universitas Nurtanio

<sup>1</sup>[gvaagnia1994@gmail.com](mailto:gvaagnia1994@gmail.com), <sup>2</sup>[indraadityaprayoga1@gmail.com](mailto:indraadityaprayoga1@gmail.com), <sup>3</sup>[dewi1untari@gmail.com](mailto:dewi1untari@gmail.com)

### Abstrak

*Kebijakan Dana Desa yang diimplementasikan sejak 2015 bertujuan memperkuat desentralisasi fiskal dan mendorong pembangunan desa, namun praktiknya kerap memunculkan konflik akibat lemahnya tata kelola, minimnya transparansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen konflik dalam implementasi Dana Desa di Kabupaten Bandung melalui perspektif administrasi publik. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan strategi studi kasus digunakan, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik utama yang terjadi dalam bentuk perbedaan kepentingan antara kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat terkait penentuan prioritas anggaran serta distribusi manfaat program. Faktor penyebab dominan meliputi keterbatasan kapasitas aparatur desa, intervensi politik lokal, dan rendahnya kepercayaan masyarakat. Strategi penyelesaian yang umum diterapkan meliputi musyawarah desa, mediasi informal melalui tokoh lokal, serta intervensi pemerintah kabupaten. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi musyawarah efektif menurunkan ketegangan jangka pendek, namun belum menyelesaikan akar permasalahan sehingga keberlanjutan konflik masih terjadi secara potensial. Artikel ini berkontribusi dengan mengintegrasikan teori manajemen konflik, prinsip good governance, dan collaborative governance untuk menjelaskan dinamika konflik di tingkat desa, sekaligus memberikan implikasi praktis berupa penguatan kapasitas aparatur, peningkatan transparansi, dan perluasan partisipasi masyarakat dalam tata kelola Dana Desa.*

**Kata Kunci:** Manajemen Konflik, Administrasi Publik, Pemerintahan Desa

### 1. Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan salah satu strategi utama pemerintah Indonesia dalam memperkuat desentralisasi fiskal dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Program Dana Desa yang mulai diterapkan sejak tahun 2015 menjadi instrumen penting untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan kelembagaan di tingkat lokal. Kebijakan ini menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dengan memberikan kewenangan dan anggaran yang signifikan untuk mengelola program sesuai kebutuhan masyarakat. Realitas pelaksanaan kebijakan Dana Desa memperlihatkan bahwa muncul berbagai persoalan tata kelola, termasuk konflik antaraktor lokal yang dapat menghambat tujuan pembangunan desa. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa konflik lokal di Indonesia sering berkaitan dengan distribusi sumber daya, ketidaksetaraan, serta lemahnya institusi dalam pengelolaan kebijakan publik (Barron, Kaiser, & Pradhan, 2004). Kondisi ini menjadikan manajemen konflik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari administrasi publik modern (Nikiforov, 2023).

Konflik dalam implementasi Dana Desa muncul akibat lemahnya kapasitas birokrasi desa, minimnya transparansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan. Penelitian di Aceh menunjukkan bahwa kurangnya keterampilan administrasi serta dominasi elite desa dalam pengambilan keputusan menimbulkan ketidakpercayaan dan memicu konflik horizontal (Handayani, Mardhiah, Macella, & Husna, 2022). Kajian lain mengungkapkan bahwa desain kebijakan yang menimbulkan kompetisi antaraktor lokal justru memperbesar potensi konflik, terutama ketika proses distribusi dana tidak berjalan inklusif (Garg, Gennaioli, Lovo, & Singer, 2019). Situasi tersebut menandakan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan Dana Desa untuk memberdayakan masyarakat dengan praktik di lapangan yang justru melahirkan ketegangan antaraktor. Kabupaten Bandung menjadi salah satu wilayah yang menarik untuk dikaji karena memiliki dinamika sosial dan politik yang kompleks, serta pernah menghadapi kasus konflik dalam implementasi kebijakan pembangunan desa.

Analisis konflik dalam konteks Dana Desa membutuhkan kerangka teoritis yang komprehensif. Teori manajemen konflik mengklasifikasikan lima gaya utama dalam penyelesaian konflik, yaitu integrasi, akomodasi, kompromi, dominasi, dan penghindaran (Setyawan, 2021). Perspektif ini memungkinkan peneliti untuk memahami strategi yang digunakan aktor desa dalam menghadapi dinamika konflik. Prinsip good governance yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi menjadi acuan normatif untuk menilai sejauh mana praktik penyelesaian konflik sesuai dengan standar tata kelola publik yang baik (Toloh, 2024). Teori collaborative governance menambahkan perspektif tentang pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan aktor non-negara dalam menciptakan penyelesaian konflik yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Toruan, Riyadi, & Gusti, 2023). Penggunaan ketiga pendekatan tersebut memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk menganalisis dinamika konflik pada implementasi Dana Desa di Kabupaten Bandung.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada pertanyaan utama mengenai strategi manajemen konflik dalam implementasi Dana Desa di Kabupaten Bandung ditinjau dari perspektif administrasi publik. Pertanyaan tersebut dirinci ke dalam empat aspek pokok, yaitu bentuk-bentuk konflik yang terjadi dalam pengelolaan Dana Desa, faktor-faktor penyebab utama konflik, strategi penyelesaian konflik yang diterapkan oleh pemerintah desa maupun pemangku kepentingan lain, serta tingkat efektivitas strategi tersebut berdasarkan teori administrasi publik. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis bentuk, penyebab, strategi penyelesaian, serta efektivitas manajemen konflik yang terjadi dalam implementasi kebijakan Dana Desa di Kabupaten Bandung. Fokus ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleksitas konflik lokal dalam kerangka administrasi publik.

Kontribusi ilmiah dari penelitian ini dapat dilihat pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini memperkaya kajian akademik mengenai konflik di tingkat lokal yang masih jarang mendapat perhatian dibanding konflik nasional atau sektoral (Arjon, 2018). Kedua, penelitian ini menyajikan bukti empiris dari Kabupaten Bandung sebagai studi kasus yang relevan dalam memahami implementasi Dana Desa di wilayah dengan karakteristik sosial politik yang dinamis. Ketiga, penelitian ini menawarkan kebaruan konseptual dengan mengintegrasikan teori manajemen konflik, prinsip good governance, dan teori collaborative governance dalam analisis administrasi publik di tingkat desa. Artikel ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori administrasi publik, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan tata kelola desa di Indonesia.

### **Tinjauan Pustaka**

Teori manajemen konflik menjadi landasan utama penelitian ini. Kerangka dasar teori manajemen konflik modern dikembangkan oleh Thomas dan Kilmann melalui instrumen TKI (Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument) yang mengidentifikasi lima gaya utama dalam penyelesaian konflik, yaitu integrasi, akomodasi, kompromi, dominasi, dan penghindaran. Relevansi teori ini dalam konteks administrasi publik terletak pada kemampuannya menjelaskan perilaku aktor dalam situasi konflik yang timbul akibat keterbatasan sumber daya dan perbedaan kepentingan. Prinsip good governance yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik juga sering digunakan sebagai kerangka konseptual untuk mengevaluasi tata kelola Dana Desa (Morasa, Suwetja, & Mintalangi, 2021). Selain itu, teori collaborative governance menawarkan perspektif bahwa penyelesaian konflik di sektor publik lebih efektif apabila melibatkan kerja sama multiaktor, baik dari pemerintah, masyarakat sipil, maupun sektor swasta, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Utami, Katharina, Asrori, Sacipto, Firmansyah, Yasin, & Budiono, 2024).

Penelitian terdahulu terkait implementasi Dana Desa menunjukkan bahwa tata kelola yang lemah berpotensi menimbulkan konflik di tingkat lokal. Studi di Aceh mengungkapkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dan keterampilan administrasi perangkat desa memicu ketidakpercayaan publik serta konflik horizontal dalam pengelolaan Dana Desa (Handayani, Mardhiah, Macella, & Husna, 2022). Kajian lain di Jawa Timur menyoroti rendahnya transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan Dana Desa, sehingga menyebabkan praktik tata kelola yang menyimpang dari prinsip good governance (Madyana, Prihantono, & Aisyah, 2020). Penelitian di Banten menemukan bahwa penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) memang membantu meningkatkan akuntabilitas, tetapi belum sepenuhnya mencegah konflik kepentingan akibat keterbatasan kapasitas aparatur (Solikin, 2018). Penelitian lain di Sulawesi Utara mengindikasikan bahwa perilaku aparatur desa terhadap pengelolaan Dana Desa mengalami perubahan setelah diberlakukan regulasi, meski masih menyisakan persoalan dalam akuntabilitas (Tasik & Lengkong, 2019).

Identifikasi terhadap literatur yang ada memperlihatkan bahwa masih terdapat research gap terkait analisis manajemen konflik dalam pengelolaan Dana Desa. Sebagian besar studi menitikberatkan pada aspek akuntabilitas, partisipasi, atau efektivitas ekonomi Dana Desa, tetapi belum banyak penelitian yang secara khusus mengaitkannya dengan teori manajemen konflik dan kerangka administrasi publik. Misalnya, penelitian konseptual tentang pengelolaan Dana Desa menunjukkan faktor partisipasi, kompetensi perangkat desa, dan

kontrol internal sebagai faktor penentu efektivitas tata kelola, namun belum mengaitkannya dengan dinamika konflik yang timbul di masyarakat (Suffah & Gamayuni, 2020). Di sisi lain, analisis tentang konflik dalam tata kelola desa seringkali terbatas pada pendekatan normatif, tanpa mengaitkannya dengan praktik empiris dan kerangka konseptual yang komprehensif (Jamaluddin, 2024).

Posisi artikel ini diarahkan untuk menjawab celah penelitian tersebut dengan menawarkan analisis manajemen konflik pada implementasi Dana Desa melalui perspektif administrasi publik. Fokus penelitian bukan hanya pada efektivitas tata kelola, melainkan juga pada identifikasi bentuk konflik, penyebab, strategi penyelesaian, serta efektivitas pendekatan yang digunakan oleh aktor desa. Dengan mengintegrasikan teori manajemen konflik, prinsip *good governance*, dan *collaborative governance*, artikel ini memberikan kontribusi literatur yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara konflik lokal dan tata kelola publik. Pendekatan ini diharapkan dapat memperluas pemahaman teoretis sekaligus memberikan rekomendasi praktis yang relevan dengan konteks Indonesia, khususnya di Kabupaten Bandung.

Tren penelitian dalam lima tahun terakhir memperlihatkan adanya pergeseran fokus pada keterkaitan antara tata kelola Dana Desa dengan kesejahteraan masyarakat serta kepercayaan publik. Studi di Lebak menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap tata kelola Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap kualitas hidup dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa (Viverita, Astuti, Martdianty, & Kusumastuti, 2022). Penelitian terbaru menekankan bahwa pengelolaan Dana Desa tidak hanya berdampak pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga dapat meningkatkan ekonomi lokal apabila tata kelola dilakukan secara partisipatif dan transparan (Ningsih & Zaidi, 2024). Di sisi lain, analisis tentang literasi keuangan dan pengaruh ideologi *New Public Management* menyoroti bahwa kurangnya kemampuan administratif perangkat desa menjadi salah satu penyebab utama kelemahan implementasi kebijakan Dana Desa (Harun, Graham, Kamase, & Mir, 2020).

Sintesis dari kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa manajemen konflik dalam implementasi Dana Desa harus dipahami melalui kombinasi perspektif teoretis dan empiris. Teori manajemen konflik menyediakan kerangka analisis mengenai strategi yang digunakan aktor desa dalam menghadapi perbedaan kepentingan. Prinsip *good governance* memberikan standar normatif untuk menilai kualitas tata kelola. *Collaborative governance* menambahkan dimensi kolaborasi multiaktor sebagai prasyarat penting bagi penyelesaian konflik yang efektif. Pemahaman ini menjadi dasar konseptual bagi penelitian kualitatif yang dilakukan di Kabupaten Bandung untuk menggali secara mendalam dinamika konflik dalam implementasi Dana Desa dan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip administrasi publik.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif dengan strategi studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali fenomena sosial secara mendalam melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian, serta memberikan ruang untuk memahami makna yang dikonstruksi oleh para aktor dalam konteks implementasi Dana Desa di Kabupaten Bandung. Studi kasus dipandang relevan karena memungkinkan peneliti untuk menelaah secara detail dinamika manajemen konflik di tingkat desa, serta menghubungkannya dengan kerangka administrasi publik. Penelitian kualitatif studi kasus telah digunakan secara luas dalam kajian kebijakan dan manajemen konflik, karena dapat menangkap kompleksitas realitas sosial yang tidak bisa direduksi hanya pada angka statistik (Toruan, Riyadi, & Gusti, 2023).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, serta warga masyarakat yang terlibat atau terdampak oleh konflik dalam pengelolaan Dana Desa. Data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, laporan pemerintah daerah, dokumen peraturan teknis terkait Dana Desa, serta berita dan laporan media yang relevan. Pemanfaatan kedua jenis data ini memungkinkan adanya triangulasi untuk meningkatkan validitas hasil penelitian (Panjaitan, Mahroza, & Widodo, 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama, yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam menggunakan panduan semi-terstruktur agar informan memiliki keleluasaan dalam menjelaskan pengalaman dan persepsinya. Observasi dilakukan secara partisipatif untuk menangkap dinamika interaksi antaraktor di desa. Studi dokumentasi mencakup analisis laporan realisasi Dana Desa, notulen rapat desa, serta arsip kebijakan pemerintah daerah. Pendekatan triangulasi metode ini penting untuk meningkatkan kredibilitas data (Gusti, 2021).

Kriteria inklusi dalam penelitian ini mencakup desa-desa di Kabupaten Bandung yang pernah mengalami konflik dalam implementasi Dana Desa, baik konflik internal antarperangkat desa maupun konflik eksternal dengan masyarakat. Kriteria eksklusi mencakup desa yang tidak memiliki rekam jejak konflik dalam pengelolaan Dana Desa, serta informan yang tidak memiliki keterlibatan langsung dengan kebijakan tersebut.

Penetapan kriteria ini bertujuan untuk memastikan bahwa unit analisis sesuai dengan fokus penelitian, yakni manajemen konflik dalam tata kelola Dana Desa (Rosada & Shonhaji, 2023).

Unit analisis penelitian ini adalah pemerintah desa dan masyarakat yang berhubungan langsung dengan implementasi Dana Desa. Subjek penelitian terdiri dari kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, pendamping desa, serta perwakilan masyarakat yang berpartisipasi dalam perencanaan maupun pengawasan Dana Desa. Pendekatan purposive sampling digunakan untuk memilih informan yang memiliki informasi mendalam terkait konflik. Pemilihan unit analisis berbasis purposif sering dipraktikkan dalam penelitian kualitatif untuk memastikan relevansi data dengan tujuan penelitian (Daulay, 2024).

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Penyajian data dilakukan melalui penyusunan matriks, narasi, atau bagan untuk memudahkan pemahaman hubungan antarvariabel. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan mengaitkan temuan empiris dengan teori manajemen konflik, good governance, dan collaborative governance. Analisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak kualitatif seperti NVivo untuk mendukung proses coding dan kategorisasi data. Pendekatan ini sejalan dengan praktik penelitian kualitatif kontemporer yang menekankan pada transparansi dan sistematisasi proses analisis data (Arsal, Hardati, & Suroso, 2021).

### 3. Hasil dan Diskusi

Penelitian ini menghasilkan temuan utama mengenai dinamika konflik dalam implementasi kebijakan Dana Desa di Kabupaten Bandung. Analisis kualitatif melalui proses coding dan kategorisasi data lapangan menemukan empat tema besar yang menjadi hasil utama, yaitu bentuk konflik, faktor penyebab konflik, strategi penyelesaian konflik, dan efektivitas strategi manajemen konflik dalam perspektif administrasi publik.

Tema pertama berkaitan dengan bentuk konflik yang muncul dalam implementasi Dana Desa. Konflik paling dominan berupa konflik kepentingan antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait penentuan prioritas penggunaan dana. Konflik lain muncul antara pemerintah desa dengan masyarakat akibat ketidakpuasan terhadap distribusi manfaat program, terutama pada proyek infrastruktur. Selain itu, konflik horizontal antarwarga juga teridentifikasi dalam proses perekrutan tenaga kerja proyek pembangunan desa. Situasi serupa pernah ditemukan pada penelitian tentang konflik pengelolaan program pembangunan di tingkat lokal di Kalimantan, yang menunjukkan bahwa konflik dapat berbentuk vertikal maupun horizontal antara aktor pemerintah dan masyarakat (Ruswandi, Sumartono, Ma'arif, & Wijaya, 2021).

Tema kedua berkaitan dengan faktor penyebab konflik. Faktor dominan yang diidentifikasi adalah kurangnya transparansi informasi terkait penggunaan Dana Desa, lemahnya akuntabilitas perangkat desa dalam pelaporan, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Faktor eksternal seperti intervensi politik lokal juga berperan dalam memperbesar potensi konflik, terutama menjelang pemilihan kepala desa. Studi sebelumnya di wilayah hutan Jawa Barat menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan antaraktor dalam pemanfaatan sumber daya juga menjadi pemicu utama konflik (Rahmawati, Hernawan, Maksudi, Dharmawan, Darusman, & Kinseng, 2018). Faktor kapasitas sumber daya manusia desa yang terbatas semakin memperburuk kondisi, sebagaimana juga teridentifikasi dalam pengelolaan konflik birokrasi di daerah hasil pemekaran wilayah administratif (Suraji & Embi, 2019).

Tema ketiga menyoroti strategi penyelesaian konflik yang diterapkan pemerintah desa. Strategi dominan yang digunakan adalah musyawarah desa dengan melibatkan kepala desa, BPD, tokoh masyarakat, dan pendamping desa untuk mencari kesepakatan. Mediasi informal juga dilakukan melalui tokoh adat atau pemuka agama sebagai pihak ketiga yang dipercaya oleh masyarakat. Pada beberapa kasus, strategi penghindaran dipilih oleh aparat desa untuk meredam eskalasi konflik, meskipun tidak menyelesaikan akar permasalahan. Hasil ini sejalan dengan studi mengenai manajemen konflik di institusi pendidikan Islam yang menemukan bahwa strategi kompromi dan mediasi digunakan sebagai pendekatan dominan untuk mengendalikan konflik (Komariah, 2022). Strategi formal berupa intervensi pemerintah kabupaten melalui inspeksi dan evaluasi juga tercatat sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang diterapkan di beberapa desa.

Tema keempat adalah efektivitas strategi manajemen konflik dalam perspektif administrasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi musyawarah desa relatif efektif dalam menurunkan ketegangan jangka pendek, tetapi masih terbatas dalam menciptakan solusi berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah masih rendah, sehingga hanya segelintir aktor dominan yang mengendalikan proses keputusan. Intervensi formal dari pemerintah kabupaten dinilai lebih efektif dalam menegakkan akuntabilitas administratif, tetapi tidak selalu menyelesaikan aspek sosial konflik. Studi mengenai praktik collaborative governance di desa-desa multikultural menunjukkan bahwa efektivitas manajemen konflik meningkat apabila melibatkan partisipasi aktif masyarakat sipil dan kelompok lokal (Arsal, Hardati, & Suroso, 2021).

Temuan lain dalam penelitian ini adalah adanya variasi pola konflik antar desa di Kabupaten Bandung. Desa dengan kepemimpinan kepala desa yang kuat dan inklusif cenderung memiliki konflik yang lebih rendah dibanding desa dengan kepemimpinan dominatif. Variasi pola ini memperlihatkan bahwa faktor kepemimpinan menjadi determinan penting dalam mencegah maupun mengelola konflik. Hal ini sejalan dengan studi tentang kepemimpinan dalam pengelolaan konflik keuangan di perguruan tinggi Islam yang menemukan bahwa kepemimpinan efektif mampu mengubah konflik menjadi peluang perbaikan manajerial (Daulay, 2024). Dalam konteks yang lebih luas, penelitian pada sektor kesehatan di Indonesia menunjukkan bahwa kepemimpinan yang mampu mengelola emosi, sensitivitas, dan empati dapat memperkuat keterampilan manajemen konflik (Rosengren, Lepp, & Widyawati, 2019).

Penelitian juga menemukan bahwa penggunaan perangkat regulasi dan teknologi, seperti aplikasi Siskeudes, membantu meningkatkan akuntabilitas dan mencegah konflik berbasis administrasi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas perangkat desa dalam mengoperasikan sistem. Studi terkait kebijakan transportasi daring di Indonesia juga menegaskan bahwa lemahnya regulasi dan kapasitas implementasi sering menjadi pemicu konflik baru (Gusti, 2021). Dalam konteks yang berbeda, penelitian mengenai konflik internal partai politik menunjukkan bahwa keberadaan lembaga penyelesaian formal internal dapat memperkuat efektivitas manajemen konflik apabila didukung aturan yang jelas (Juswil, Nofrima, Suswanta, & Saputra, 2022).

Hasil penelitian ini menggambarkan kompleksitas konflik dalam implementasi Dana Desa di Kabupaten Bandung dengan variasi bentuk, faktor penyebab, strategi penyelesaian, dan tingkat efektivitas yang berbeda-beda. Setiap kategori hasil menunjukkan relevansi kuat dengan kerangka teori manajemen konflik, prinsip good governance, dan teori collaborative governance yang digunakan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa konflik dalam implementasi Dana Desa di Kabupaten Bandung bersumber dari kepentingan yang berbeda antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan rumusan masalah yang diajukan, yaitu bagaimana strategi manajemen konflik diterapkan dalam kerangka administrasi publik. Bentuk konflik yang dominan adalah konflik kepentingan dalam penentuan prioritas anggaran serta distribusi manfaat program. Penyebab utamanya terletak pada lemahnya transparansi, rendahnya partisipasi, dan terbatasnya kapasitas perangkat desa. Strategi yang diambil umumnya berupa musyawarah, mediasi, serta intervensi pemerintah kabupaten. Efektivitasnya masih terbatas karena partisipasi publik tidak optimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa prinsip good governance belum sepenuhnya terinternalisasi dalam tata kelola Dana Desa (Morasa, Suwetja, & Mintalangi, 2021).

Interpretasi temuan ini dalam kerangka teori manajemen konflik menunjukkan bahwa pemerintah desa lebih banyak menggunakan strategi kompromi dan penghindaran, daripada integrasi yang menekankan pencarian solusi win-win. Hal ini menggambarkan preferensi aktor lokal untuk menjaga stabilitas jangka pendek, meskipun akar konflik tidak sepenuhnya diselesaikan. Dalam perspektif collaborative governance, penyelesaian konflik masih kurang melibatkan aktor non-negara, sehingga potensi untuk menghasilkan solusi inklusif dan berkelanjutan belum maksimal (Utami, Katharina, Asrori, Sacıpto, Firmansyah, Yasin, & Budiono, 2024). Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas aktor desa dalam memilih strategi manajemen konflik yang sesuai dengan prinsip tata kelola publik.

Perbandingan dengan studi terdahulu memperlihatkan bahwa hasil penelitian ini konsisten dengan temuan di Aceh yang menunjukkan konflik Dana Desa muncul akibat minimnya keterampilan administrasi dan partisipasi masyarakat (Handayani, Mardhiah, Macella, & Husna, 2022). Namun, penelitian ini juga menemukan variasi pola konflik antar desa di Kabupaten Bandung, yang menunjukkan peran kepemimpinan kepala desa dalam menekan eskalasi konflik. Hasil ini memperkaya literatur karena sebagian besar penelitian sebelumnya tidak banyak menyoroti faktor kepemimpinan sebagai determinan manajemen konflik. Studi di desa adat Baduy dan Tengger, misalnya, menekankan dominasi peran pemimpin adat dalam mekanisme resolusi konflik berbasis musyawarah, tanpa melihat variasi gaya kepemimpinan formal (Utami et al., 2024). Dalam konteks wisata desa di Yogyakarta dan Bali, penyelesaian konflik melibatkan institusi adat maupun pemuda desa, yang menegaskan pentingnya aktor lokal non-formal (Hamid, Martini, Siswanto, & Riady, 2023). Hal ini berbeda dengan hasil penelitian di Kabupaten Bandung yang lebih banyak bergantung pada struktur formal pemerintah desa.

Kontribusi ilmiah dari artikel ini terletak pada integrasi tiga kerangka konseptual, yaitu teori manajemen konflik, prinsip good governance, dan teori collaborative governance, dalam menganalisis dinamika konflik Dana Desa. Integrasi ini memperluas diskursus administrasi publik dengan menambahkan dimensi manajemen konflik yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian. Selain itu, artikel ini memperkaya literatur empiris dengan studi kasus Kabupaten Bandung, yang memperlihatkan interaksi antara kepemimpinan, partisipasi masyarakat, dan kapasitas birokrasi desa dalam mempengaruhi efektivitas manajemen konflik. Temuan ini dapat menjadi referensi penting bagi pengembangan teori administrasi publik dalam konteks desentralisasi fiskal dan tata kelola desa di Indonesia.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada lingkup wilayah yang terbatas pada beberapa desa di Kabupaten Bandung, sehingga generalisasi hasil ke seluruh Indonesia perlu dilakukan dengan hati-hati. Data yang diperoleh juga bergantung pada wawancara mendalam dan dokumentasi, sehingga interpretasi sangat bergantung pada subjektivitas informan. Keterbatasan lainnya adalah belum optimalnya eksplorasi peran aktor eksternal, seperti lembaga swadaya masyarakat atau sektor swasta, dalam memengaruhi dinamika konflik di desa. Keterbatasan ini sejalan dengan tantangan penelitian kualitatif yang menekankan kedalaman daripada keluasan temuan (Handoko, Larasati, Pradhanawati, & Santosa, 2019).

Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas perangkat desa dalam tata kelola administrasi dan komunikasi publik sangat penting untuk mencegah konflik. Program pelatihan dan pendampingan berkelanjutan dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Pemerintah kabupaten perlu memperkuat mekanisme supervisi dengan tetap menghormati otonomi desa, serta membuka ruang kolaborasi dengan aktor non-pemerintah. Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada eksplorasi peran kepemimpinan transformasional dalam mengelola konflik di tingkat desa, atau pada perbandingan antarwilayah dengan dinamika sosial politik yang berbeda. Studi mengenai kapasitas inovasi sosial dalam pengelolaan sumber daya desa juga relevan untuk memperluas pemahaman tentang strategi penyelesaian konflik berbasis kolaborasi (Purwanto, Yuliana, Hidayat, Yaumidin, Nadjib, Sambodo, Hidayatina, Handoyo, & Suryanto, 2021).

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik dalam implementasi Dana Desa di Kabupaten Bandung muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari perbedaan kepentingan antaraktor pemerintah desa dan BPD, ketidakpuasan masyarakat terhadap distribusi manfaat, hingga konflik horizontal antarwarga dalam pelaksanaan program pembangunan. Faktor penyebab utamanya teridentifikasi pada lemahnya transparansi, rendahnya akuntabilitas, terbatasnya kapasitas perangkat desa, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Strategi penyelesaian konflik yang diterapkan lebih banyak mengandalkan musyawarah desa, mediasi informal melalui tokoh masyarakat, serta intervensi pemerintah kabupaten. Strategi-strategi tersebut relatif berhasil meredakan ketegangan jangka pendek, tetapi belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan sehingga efektivitas jangka panjang masih terbatas. Artikel ini berkontribusi dengan menawarkan integrasi antara teori manajemen konflik, prinsip good governance, dan pendekatan collaborative governance dalam menganalisis dinamika konflik pada tingkat desa. Kontribusi teoretisnya terletak pada penegasan bahwa efektivitas manajemen konflik di sektor publik tidak hanya ditentukan oleh mekanisme formal, tetapi juga oleh kapasitas kepemimpinan lokal dan kualitas partisipasi masyarakat. Dari sisi praktis, hasil penelitian memberikan masukan bagi pemerintah desa dan kabupaten dalam merancang strategi pengelolaan konflik yang lebih inklusif, transparan, serta berbasis pada kolaborasi multiaktor. Implikasi penelitian ini adalah perlunya peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan berkelanjutan di bidang administrasi publik, komunikasi, dan resolusi konflik, serta pembukaan ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan dan pengawasan Dana Desa. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada eksplorasi peran aktor non-pemerintah, seperti lembaga swadaya masyarakat atau sektor swasta, dalam memperkuat mekanisme resolusi konflik di desa. Selain itu, studi perbandingan antarwilayah dengan karakteristik sosial politik yang berbeda akan memperkaya pemahaman mengenai variasi pola konflik dan efektivitas strategi penyelesaiannya.

#### Daftar Pustaka

1. Arjon, A. (2018). Conflict management in Indonesia: Policy perspective and implementation. *Jurnal Bina Praja*, 10(2), 121–133.
2. Arsal, T., Hardati, P., & Suroso. (2021). Analysis of conflict management strategy in social-disaster prone community. *Proceedings of the 6th International Conference on Education & Social Sciences (ICESS 2021)*.
3. Barron, P., Kaiser, K., & Pradhan, M. (2004). Local conflict in Indonesia: Measuring incidence and identifying patterns. *World Bank Policy Research Working Paper No. 3384*.
4. Daulay, N. K. (2024). The handling of conflict in financing Islamic higher education in Indonesia. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 16(1), 123–134.
5. Garg, T., Gennaioli, C., Lovo, S., & Singer, G. (2019). Competition and conflict: Evidence from a community-driven development program in Indonesia. *American Economic Journal: Applied Economics*, 11(3), 1–40.
6. Gusti, D. P. (2021). Public policy inconsistency of online and conventional land transportation regulations in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 557–566.
7. Handayani, S., Mardhiah, N., Macella, A. D. R., & Husna, C. (2022). Does the village fund policy during the COVID-19 pandemic become community conflict sources? *International Journal of Advances in Social Sciences and Humanities*, 1(1), 45–58.
8. Hamid, A. R., Martini, M., Siswanto, A., & Riady, Y. (2023). Conflicts in tourism villages and their settlement mechanisms: Case study in Bali, Yogyakarta, Subang, Indonesia. *International Journal of Business, Law, and Education*, 4(1), 23–41.
9. Handoko, W., Larasati, E., Pradhanawati, A., & Santosa, E. (2019). Why land conflict in rural Central Java never ended: Identification of resolution efforts and failure factors. *Eurasian Journal of Social Sciences*, 7(1), 19–28.
10. Harbi, J., Cao, Y., Milantara, N., Gamin, A. B., Mustafa, A., & Roberts, N. (2021). Understanding people–forest relationships: A key requirement for appropriate forest governance in South Sumatra, Indonesia. *Sustainability*, 13(7), 7029.
11. Harun, H., Graham, C., Kamase, H., & Mir, M. (2020). Institutionalising accrual accounting in the Indonesian public

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.3167>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- sector. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 10(1), 1–20.
12. Jamaluddin, J. (2024). Governance challenges in village fund management: An Indonesian perspective. *Jurnal Administratie Publica*, 10(1), 55–67.
  13. Juswil, A. K., Nofrima, S., Suswanta, & Saputra, H. A. (2022). How do political parties handle their internal problems? Comparative study of nationalist and Islamic parties in Indonesia. *Proceedings of the International Conference on Government, Politics, and Social Sciences*.
  14. Komariah, B. (2022). Conflict management of Islamic education institutions in Indonesia: A literature review. *Jurnal Pendidikan Progresif*, 12(2), 87–97.
  15. Madyana, D., Prihantono, B., & Aisyah, N. (2020). Transparency and accountability of village fund management in East Java. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 15–29.
  16. Morasa, J., Suwetja, I., & Mintalangi, S. (2021). Village fund management in public sector accounting system: Case from East Indonesian region. *Proceedings of the International Conference on EAI Technologies*.
  17. Nikiforov, V. (2023). Social conflict in the sphere of public administration: Nature, types and methods of regulation. *Public Administration Issues*, 2023(2), 134–152.
  18. Ningsih, R., & Zaidi, S. (2024). Village fund governance and local economic development in Indonesia. *International Journal of Public Sector Management*, 37(1), 89–105.
  19. Panjaitan, P., Mahroza, J., & Widodo, P. (2020). Indonesia defense diplomacy: Papua's problem perspective. *Technium Social Sciences Journal*, 12(1), 45–56.
  20. Purwanto, P., Yuliana, C. I., Hidayat, S., Yaumidin, U. K., Nadjib, M., Sambodo, M., Hidayatina, A., Handoyo, F., & Suryanto, J. (2021). Social innovation in social forestry: Seeking better management for sustainable forest in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 917(1), 012010.
  21. Rahmawati, R., Hernawan, D., Maksudi, B. I., Dharmawan, A., Darusman, D., & Kinseng, R. (2018). Conflict management in forest resources in West Java and West Kalimantan. *Proceedings of the International Conference on Environment and Forestry*.
  22. Rosada, A. A., & Shonhaji. (2023). Conflict management in Indonesia through religious moderation. *KnE Social Sciences*, 8(5), 188–199.
  23. Rosengren, K., Lepp, M., & Widyawati, W. (2019). Drama, leadership and conflict management to support nurse's professional development: A qualitative study in Indonesia. *Journal of Nursing Management*, 27(8), 1742–1749.
  24. Ruswandi, D., Sumartono, S., Ma'arif, S., & Wijaya, A. (2021). Conflict analysis of forest and land fires in implementing collaborative governance on disaster management in Kalimantan Indonesia. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 56(2), 10–21.
  25. Setyawan, A. (2021). Conflict management and job satisfaction in Indonesia's education sector. *Journal of Asian Development Studies*, 10(2), 55–66.
  26. Solikin, A. (2018). Implementation of village financial system and accountability in Banten. *Jurnal Akuntansi*, 22(3), 467–482.
  27. Suffah, R., & Gamayuni, R. R. (2020). The effect of village apparatus competence, internal control system, and community participation on village fund management accountability. *Jurnal Akuntansi*, 24(1), 45–60.
  28. Suraji, S., & Embi, M. A. (2019). Administrative region proliferation and a conflict of interests on public bureaucracy distribution in Indonesia. *Proceedings of the Annual International Conference of Business and Public Administration (AICoBPA 2018)*.
  29. Tasik, F., & Lengkong, D. (2019). The effect of village fund management on village apparatus behavior in North Sulawesi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 134–142.
  30. Toloh, M. (2024). Conflicts of interest and handling mechanisms in public administration: A study of local government institutions in Indonesia. *Jurnal Administratie Publica*, 11(1), 77–89.
  31. Toruan, T. L., Riyadi, B. S., & Gusti, D. P. (2023). Conflict management and strategy management at the state borders of Indonesia. *International Journal of Membrane Science and Technology*, 10(1), 112–124.
  32. Utami, N. S., Katharina, R., Asrori, A., Sacipto, R., Firmansyah, A., Yasin, A., & Budiono, A. (2024). Conflict resolution in the customary village governance administration of Baduy, Tengger, and Samin ethnic groups in Indonesia. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(8), 1–14.
  33. Viverita, V., Astuti, R., Martdianty, F., & Kusumastuti, R. (2022). Community perceptions of village fund governance and its impact on rural development. *Journal of Rural Studies*, 93, 112–123.
  34. Widodo, P., Mahroza, J., & Panjaitan, P. (2020). Indonesia defense diplomacy: Papua's problem perspective. *Technium Social Sciences Journal*, 12(1), 33–44.
  35. Zulkifli, Z., Ariyanto, M., Sunaryo, J., & Hamirul, H. (2024). Building community capacity in village fund management: Implementation of the public administration assistance model in Rantau Pandan Village, Indonesia. *Indonesian Community Empowerment Journal*, 4(1), 15–27.